

ABSTRACT

Poor families in rural areas of developing countries such as Indonesia, not only experiencing limited access on consuming private goods but also consuming access to public goods. Majority of rural household in developing countries have very limited access on electricity, safe and clean water and improve sanitation. In Indonesia cases, the gap in theses accesses is not only between islands but also it is between rural and urban areas in a island. This study focuses on access to public goods. Public goods can be provided by government or provided by individual. There are two essays in this study. Essay one focuses on public goods provided by government, and essay two focuses on individual contribution on public goods provision

Esai one discusses government provision on access to public goods at village's level. The terms of public goods include: access on state electricity from *perusahaan listrik negara* (PLN); safe and clean water from *perusahaan daerah air minum* or PDAM; and improve sanitation include garbage collection and public toilet distribution. Therefore, these access on public goods can be provided by central government or state-own enterprise, local government or regional-own enterprise or any related Ministry or Department. Essay one utilize census data from village characteristics for census in 2005 and 2011. Applying ordinary least square regression based on pool cross section data, essay one finds the following. Geographic disadvantages such as located inside the forest, in hilly side of mountainous, or along the riverside; therefore accesses of transportation to the villages is limited, and villages which is inhabited mostly by population working on agriculture and villages do not have mineral resources; are found significantly have lower access on all accesses unless the public toilet. Our limitation of data collection, this study does not find similar result regarding the impact of social heterogeneity in the villages. Alesina, Baqir and Easterly (1999) and Baneerje, Iyer and Somanthan (2008) argue that social heterogeneity, measured by fractionalization index of ethnic and religion have negative impact on public goods provision and other development indicator.

Applying laboratory experimental study, essay two focuses on whether altruistic behavior and volunteering motive of individual contribution changes when they get exposure of information regarding heterogeneity and constraint are applied. The experimental study found that the level of individual contribution does decrease but it is not significant as the information of religion and endowment heterogeneity are applied. Religion and income level is sensitive issues in some cases. Being exposure by information about religion and income heterogeneity might influence individual intrinsic motive for contributing. On the other hand, special restriction under uncomfortable condition can influence individual decision for doing volunteer labor. This study applies provision point mechanism (PPM) and heterogeneous endowment on the other experiment environment. The experimental result as follows. Firstly, the average contribution does not decrease significantly in heterogeneous religion and heterogeneous income environment. This indicates that subject has strong intrinsic motive or they have pure altruistic behavior in volunteering for public goods provision. Secondly, average contribution increase significantly in moderate heterogeneous endowment but followed by restriction that total contribution must equal to 40 token/endowment/*sumber daya experiment* (SDE).



ABSTRAK

Masyarakat miskin di wilayah perdesaan negara berkembang seperti Indonesia, tidak hanya menghadapi keterbatasan pada konsumsi barang yang diperjualbelikan di pasar (barang *private*) namun juga pada konsumsi akses barang publik. Ketersediaan akses barang publik seperti jaringan listrik, air bersih dari PDAM, perbaikan sanitasi dalam bentuk akses angkutan sampah dan distribusi jamban umum bagi masyarakat desa relatif jauh lebih rendah dibanding akses yang dinikmati masyarakat di wilayah perkotaan. Studi ini berupa esai penyediaan barang publik di Indonesia, yang terdiri dari dua esai.

Esai satu membahas penyediaan pemerintah pada akses barang publik di level desa. Akses barang publik yang dimaksud adalah listrik dari PLN, air bersih dari PDAM, dan perbaikan sanitasi lingkungan dalam bentuk angkutan sampah dan jamban umum. Dengan menggunakan data sensus potensi desa tahun 2005 dan tahun 2011, studi pada esai satu menemukan sebagai berikut. Pertama, kesulitan geografis desa dan keterbatasan sumber mata mata pencaharian penduduk desa berkaitan dengan semakin terbatasnya empat akses barang publik yang dikaji. Berbeda dengan studi-studi dari Alesina, Baqir dan Easterly (2009) dan Banerjee, Iyer dan Somanathan (2008) studi ini menemukan bahwa keberagaman identitas sosial dalam bentuk suku dan agama tidak sepenuhnya berkaitan dengan distribusi akses barang publik yang lebih rendah. Selanjutnya, akses listrik dan air bersih yang lebih baik ditemukan berkaitan dengan jumlah industri atau kerajinan rumah tangga yang lebih banyak di desa. Kegiatan gotong royong ditemukan relatif berlangsung lebih baik pada desa-desa yang mempunyai jumlah rumah tangga pelanggan listrik lebih banyak.

Esai dua mengkaji partisipasi individu pada kegiatan gotong royong penyediaan barang publik dengan pendekatan laboratorium eksperimen. Hal yang ingin dikaji dari studi eksperimen ini adalah apakah sikap altruisme individu pada kegiatan gotong royong untuk penyediaan barang publik berubah dengan adanya informasi dan kondisi keberagaman agama, keberagaman sumber daya dan ketentuan minimal dalam berkontribusi dan dalam situasi keberagaman sumber daya. Studi eksperimen ini menemukan bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan subjek relatif tidak berubah dengan adanya kondisi keberagaman agama, keberagaman kepemilikan sumber daya dalam kelompok, serta ketentuan minimal untuk memberi kontribusi dalam kondisi keberagaman kepemilikan sumber daya. Temuan eksperimen ini memberi indikasi bahwa sikap altruisme subjek relatif tidak berubah dengan adanya kondisi keberagaman dalam anggota kelompok serta ketentuan yang bersifat memaksa subjek untuk berkontribusi.